

PROSIDING

Seminar Nasional

**Pengembangan Teknopreneur
Berbasis Pertanian untuk Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat**

**Purwokerto
9 Juni 2012**

Editor :
Oetami Dwi Hajoeningtjas
Anis Shofiyani
Dumasari
Watemin



**Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL 2012

PENGEMBANGAN TEKNOPRENEUR BERBASIS PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Hak Cipta @ 2012, Fakultas Pertanian
Cetakan Pertama September 2012
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jl. Raya Dukuhwaluh PO. Box 202 Purwokerto 53182
Telp. : 0281 636751 ext. 127
Fax. : 0281 637239
e-mail : pertanian@ump.ac.id

Isi dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya.

Penyuntingan semua tulisan dalam Prosiding ini dilakukan oleh Tim Penyunting Seminar Nasional 2012 dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu : Oetami Dwi Hajoeningtjas, Anis Shofiyani, Dumasari, dan Watemin.

ISBN : 978-602-99470-2-1

**PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TEKNOPRENEUR
BERBASIS PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

ORAL

Budi Widayanto

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta
budiwidayanto@ymail.com

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi saat ini mengalami transformasi pola pemanfaatan dari pembangunan berbasis sumberdaya alam menuju pembangunan berbasis sumberdaya manusia. Dengan perubahan pola tersebut maka peran pengembangan sumberdaya manusia menjadi sangat penting. Pembangunan yang tidak berbasis pada pembangunan sumberdaya manusia akan berimplikasi pada beberapa hal, antara lain; banyaknya sumberdaya manusia (tenaga kerja) yang tidak terakomodasi dalam proses pembangunan dan menimbulkan pengangguran, rendahnya nilai tambah suatu komoditas, dan tidak berkembang potensi suatu wilayah. Problem utama yang dihadapi oleh sektor pertanian dan wilayah perdesaan adalah rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya penanganan pasca panen dan penerapan teknologi terutama pengolahan, akses pasar komoditas, sehingga arus keseimbangan produksi dan konsumsi komoditas tidak dapat terpenuhi. Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan usaha terobosan dengan pengembangan jiwa kewirausahaan sumberdaya manusia berbasis teknologi (teknopreneur) untuk di wilayah perdesaan/ pertanian. Adanya pengembangan teknopreneur akan menciptakan peluang pengembangan masyarakat dengan basis pertanian dan meningkatkan kapasitas pembangunan di wilayah perdesaan/ pertanian. Tentunya terobosan gerakan menciptakan sumberdaya manusia yang menguasai teknopreneur perlu didukung dengan kreasi kelembagaan untuk menciptakan sinergi yang utuh dari proses pengembangan komoditas pada wilayah hulu dan hilir, serta proses kemandirian sektor pertanian menuju industri pertanian berbasis kemampuan lokal.

Kata kunci: *pengembangan, teknopreneur, wilayah*

PENDAHULUAN

Dewasa ini pola pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Pada masa lalu pembangunan ekonomi yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditunjang oleh keberadaan Sumberdaya Alam (SDA) yang relatif melimpah. Sedangkan pada masa sekarang pembangunan ekonomi lebih mengutamakan pada pendayagunaan Sumberdaya Manusia (SDM).

**PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TEKNOPRENEUR
BERBASIS PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

ORAL

Budi Widayanto

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta
budiwidayanto@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi saat ini mengalami transformasi pola pemanfaatan dari pembangunan berbasis sumberdaya alam menuju pembangunan berbasis sumberdaya manusia. Dengan perubahan pola tersebut maka peran pengembangan sumberdaya manusia menjadi sangat penting. Pembangunan yang tidak berbasis pada pembangunan sumberdaya manusia akan berimplikasi pada beberapa hal, antara lain; banyaknya sumberdaya manusia (tenaga kerja) yang tidak terakomodasi dalam proses pembangunan dan menimbulkan pengangguran, rendahnya nilai tambah suatu komoditas, dan tidak berkembang potensi suatu wilayah. Problem utama yang dihadapi oleh sektor pertanian dan wilayah perdesaan adalah rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya penanganan pasca panen dan penerapan teknologi terutama pengolahan, akses pasar komoditas, sehingga arus keseimbangan produksi dan konsumsi komoditas tidak dapat terpenuhi. Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan usaha terobosan dengan pengembangan jiwa kewirausahaan sumberdaya manusia berbasis teknologi (teknopreneur) untuk di wilayah perdesaan/ pertanian. Adanya pengembangan teknopreneur akan menciptakan peluang pengembangan masyarakat dengan basis pertanian dan meningkatkan kapasitas pembangunan di wilayah perdesaan/ pertanian. Tentunya terobosan gerakan menciptakan sumberdaya manusia yang menguasai teknopreneur perlu didukung dengan kreasi kelembagaan untuk menciptakan sinergi yang utuh dari proses pengembangan komoditas pada wilayah hulu dan hilir, serta proses kemandirian sektor pertanian menuju industri pertanian berbasis kemampuan lokal.

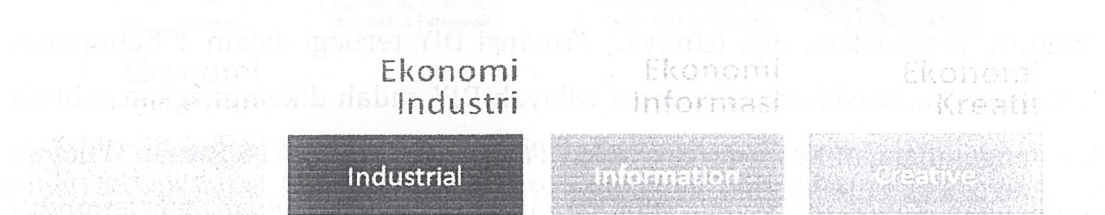
Kata kunci: *pengembangan, teknopreneur, wilayah*

PENDAHULUAN

Dewasa ini pola pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Pada masa lalu pembangunan ekonomi yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditunjang oleh keberadaan Sumberdaya Alam (SDA) yang relatif melimpah. Sedangkan pada masa sekarang pembangunan ekonomi lebih mengutamakan pada pendayagunaan Sumberdaya Manusia (SDM).

Perubahan ini disebabkan oleh kelangkaan (*scarcity*) sumberdaya alam dan pilihan produksi dari sumberdaya alam yang ada harus mengutamakan asas efisiensi, sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang optimal.

Peran sumberdaya manusia menjadi penting, mengingat SDM memungkinkan ditingkatkan kreatifitas ide dan gagasan serta *stock of knowledge* sebagai faktor utama dalam memproduksi suatu komoditi. Pentingnya penanganan SDM merupakan respon atas pola pergeseran orientasi ekonomi dunia barat, di mana telah terjadi pergeseran dari era pertanian ke era industrialisasi, disusul oleh era informasi. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa Negara-negara maju mulai menyadari bahwa saat ini mereka tidak bisa mengandalkan supremasi di bidang industri lagi, tetapi mereka harus lebih mengandalkan SDM yang kreatif, sehingga kemudian pada tahun 1990-an dimulailah era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas, yang populer disebut Ekonomi Kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut Industri Kreatif (Departemen Perdagangan, 2008).



Gambar 1. Pergeseran Orientasi Ekonomi Dunia Barat.

Kreatifitas ide dan gagasan memberikan ruang yang luas untuk berkembang dan menciptakan komoditas yang memiliki nilai tambah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kreasi produk yang sangat banyak di pasar komoditi olahan. Untuk menangani kreasi tersebut tentunya dibutuhkan konsep teknopreneur yang mampu merubah komoditi primer menjadi olahan yang memberikan nilai tambah dengan banyaknya inovasi-inovasi teknologi.

Berkaitan upaya pemberdayaan masyarakat khususnya pertanian dengan kondisi masyarakat yang memiliki anatomi serba terbatas (jumlahnya banyak, pendidikan rendah, lahannya sempit/ miskin, bekerja tidak efisien, teknologi rendah/ produktivitas/KK rendah). Disamping itu masyarakat pertanian (petani)

merupakan kelompok sosial yang lemah secara politik dan ekonomi. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan membuat kebijakan yang dapat menolong atau membantu nasib petani dan dunia pertanian untuk herkemhang potensinya.

Menempatkan agribisnis sebagai pusat pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang paling bijak, mengingat 75% dari total tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor agribisnis. Data lain menunjukkan bahwa 95% usaha di Indonesia bergerak pada usaha kecil, menengah dan koperasi dan 85% diantaranya bergerak pada sektor agribisnis (Cornelis Rintuh dan Miar, 2005).

POTENSI EKONOMI WILAYAH DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km², dengan luas potensi yang mendukung pembangunan pertanian adalah seluas 226.140 ha terdiri dari lahan sawah 56.538 ha dan bukan sawah 169.602 ha. Potensi tersebut tersebar pada berbagai bidang, antara lain: tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, dan lainnya. Provinsi DIY terbagi dalam 4 Kabupaten dan 1 Kotamadia, berdasarkan potensi wilayah DIY sudah dikembangkan sebuah Kluster Pengembangan Kawasan Provinsi DIY yang terdiri dari 14 Satuan Wilayah Pengembangan Kawasan (SWPK) dan seruap wilayah ditentukan oleh komoditi unggulannya.

Di setiap satuan wilayah memiliki keunggulan yang diproyeksikan akan mampu menjadi pemicu bagi pertumbuhan wilayah, dalam kenyataannya perlu dikaji kembali keunggulan komoditas yang lebih spesifik untuk wilayah sehingga akan berdampak lebih luas bagi masyarakat, wilayah dan sektornya. Hal ini penting karena selama ini penentuan komoditas unggulan masih pada interaksi kepentingan sektor, wilayah, dan program, sehingga lebih menonjol pada persoalan kelembagaanya dari pada kepentingan secara lebih luas khususnya pemberdayaan masyarakat.

S V
Pen
Pe
Par

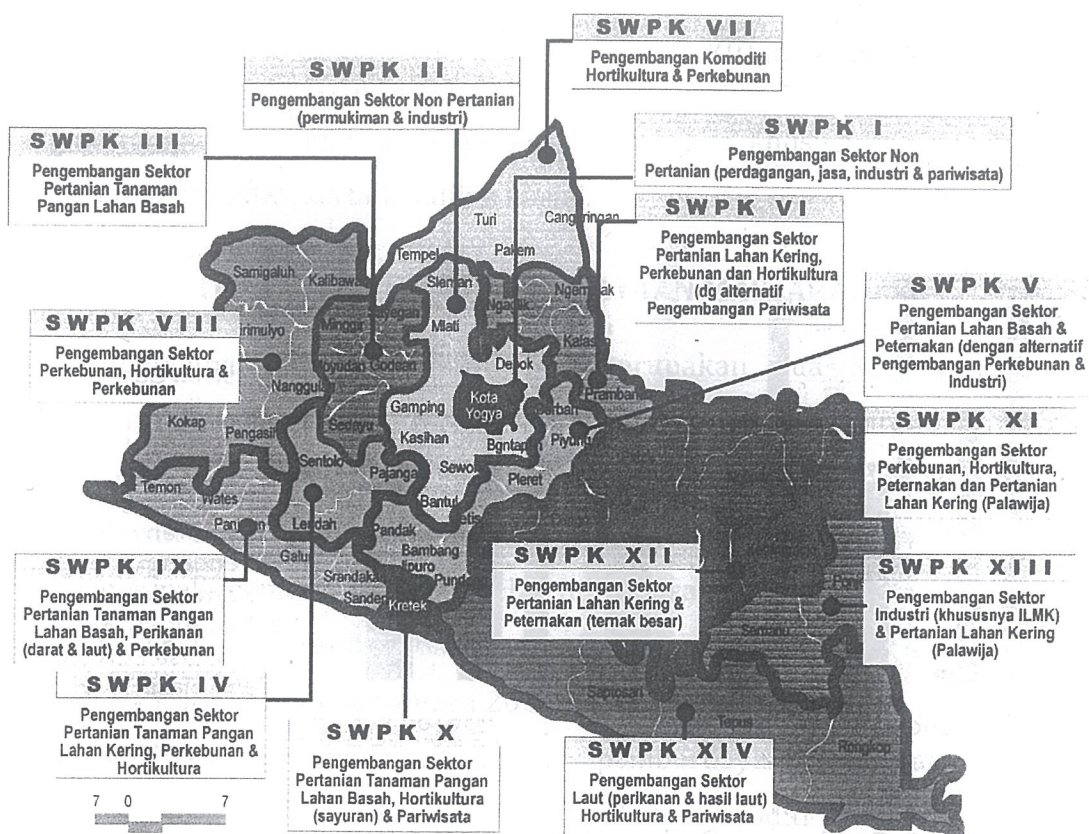
S
F
Pe

S
Pe
P
L
L
d

Sumbe

menur
pada p
mengi
andala
pertun

pertan
daerah
kebutu
konsej
wisata



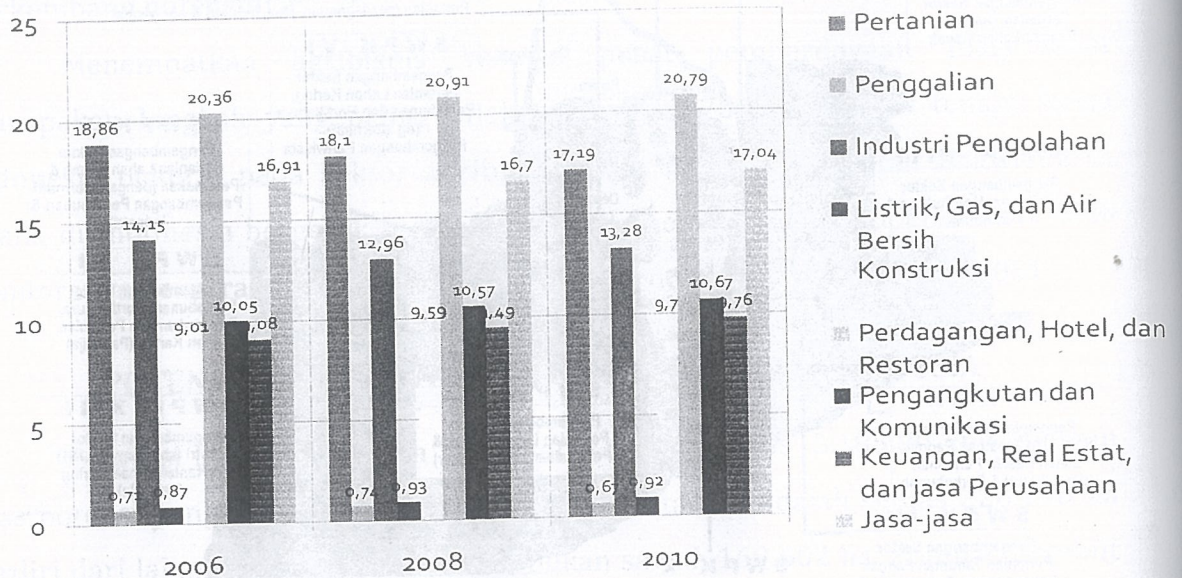
Gambar 2. Kluster Pengembangan Kawasan Provinsi DIY

Sumber: Bahan Raker Perencanaan Pembangunan Pertanian Bappeda Provinsi DIY

Didasarkan pada sumbangan sektor pada Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan pekerjaan dalam persen (%) di DIY, sektor pertanian berada pada posisi kedua setelah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Hal ini wajar mengingat sektor ini pendukung sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan di Provinsi DIY. Sektor yang penting di DIY adalah sektor jasa-jasa yang pertumbuhannya positif dibandingkan sektor pertanian yang cenderung negatif.

Didasarkan perkembangan ketiga sektor tersebut membicarakan sektor pertanian sangat penting, hal ini didasarkan pada karakter DIY yang merupakan daerah pariwisata (saat ini berkembang desa wisata) dan kota pendidikan, maka kebutuhan akan sektor pertanian akan tetap tinggi. Disamping itu pertanian dalam konsep agribisnis dalam dikembangkan lebih luas untuk memenuhi kebutuhan wisata dan konsumsi, serta pemberdayaan dan pembangunan masyarakat

berwawasan lingkungan, sehingga akan terjadi intensitas interaksi antar sektor penggerak perekonomian di DIY.



Gambar 3. Sumbangan Berbagai Sektor terhadap PDRB Provinsi DIY

Sumber: Bahan Raker Perencanaan Pembangunan Pertanian Bappeda Provinsi DIY

Berdasarkan potensi pada kondisi rumah tangga dan sumberdaya manusia di Provinsi DIY terdiri dari Rumah Tangga Pertanian (RTP) sebesar 47,17% atau sejumlah 471.563 rumah tangga petani atau 1.753.786 orang. Berdasarkan data Dinas Pertanian DIY tahun 2010 menunjukkan bahwa lebih dari 40% anggota RTP adalah petani/ buruh tani. Dilihat dari umur, hampir separuh (46%) dari petani/ buruh tani berusia lanjut atau berusia lebih besar 55 tahun. Disamping itu tingkat pendidikan sebagian besar petani (70,64%) adalah setara SD/ tidak lulus SD dengan kepemilikan lahan sebesar kurang dari 0,5 ha, sehingga hampir 80,29% merupakan petani gurem.

Berdasarkan data tersebut maka peran pihak eksternal (pemerintah, swasta, dunia pendidikan) sangat menentukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian. Pihak eksternal perlu melakukan program terobosan yang mampu memberikan stimulan dan menciptakan kegairahan masyarakat tani untuk meningkatkan kapasitas partisipasinya, sehingga masyarakat tidak hanya melaksanakan kegiatan usahatani sebagai unsur

budaya sosial tetapi mampu merubah *mindset* untuk memasuki budaya bisnis atau ekonomi hijau. Di mana ekonomi hijau diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga menjamin lapangan kerja dan dapat mengurangi kemiskinan, berasas lingkungan, khususnya ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta keadilan sosial.

ALTERNATIF POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

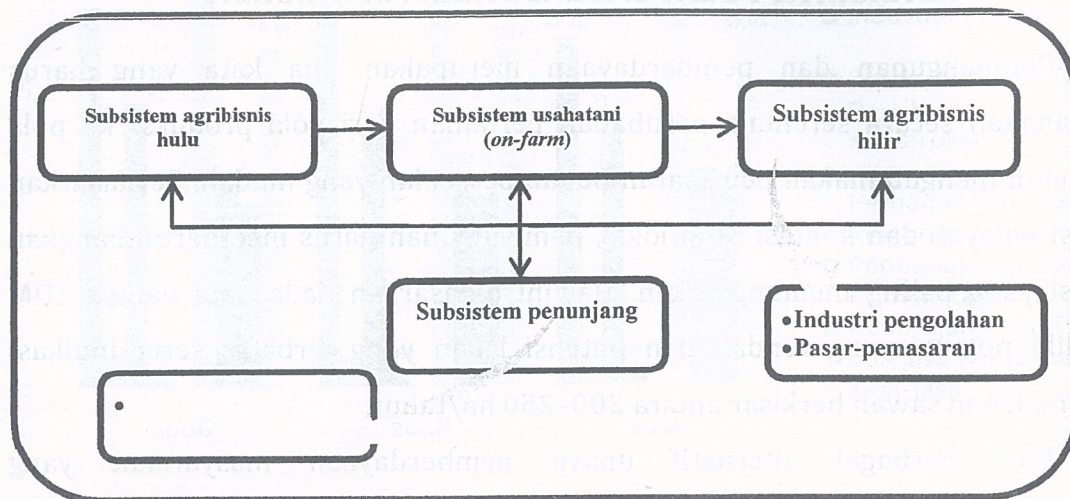
Pembangunan dan pemberdayaan merupakan dua kata yang harus dilaksanakan secara serentak, perubahan pertanian dari pola produksi ke pola yang lebih mengutamakan pemasaran bukan persoalan yang mudah. Berdasarkan potensi wilayah dan kondisi SDM lokal, pembangunan harus mempertimbangkan potensi yang paling memungkinkan. Hal ini didasarkan pada data bahwa SDM memiliki potensi yang rendah dan potensi lahan yang terbatas serta indikasi konversi lahan sawah berkisar antara 200–250 ha/tahun.

Dari berbagai alternatif upaya pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan adalah peningkatan nilai tambah komoditi atau hilirisasi atau menumbuhkan industri di wilayah perdesaan atau industri pertanian. Dengan dukungan berbagai pihak untuk tumbuh secara bersama-sama, alternatif ini dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam membangun diri, sektor dan wilayahnya.

Dari keempat subsistem dalam agribisnis pembangunan pertanian lebih utama diarahkan pada pengembangan subsistem agribisnis hilir (industry pengolahan-pasar-pemasaran) dibandingkan pada subsistem agribisnis yang lainnya. Perubahan pendekatan dari produksi ke penguatan (konsentrasi) penanganan hasil panen dan *marketing* akan mempermudah analisis produksinya dan mempermudah upaya pemberdayaan masyarakatnya. Penajaman pada subsistem ini perlu energi yang besar dari pihak pemerintah, hal ini didasarkan pada kondisi anatomi petani yang terbatas maka pihak penguasa dapat melakukan inisiatif dan pengaturan sesuai teori pemberdayaan masyarakat yang bebas *strategi power-coersive*.

Dari teori ini diasumsikan bahwa 1). Manusia akan mengikuti keinginan dari pihak lain yang dipandang memiliki kekuasaan lebih besar. Terlebih lagi bila sebagian sumber pemenuhan kebutuhan dia berada pada pihak tersebut, 2).

Masyarakat yang memiliki tingkat intelektual yang rendah dan situasi masyarakat yang anomi menuntut peran yang lebih besar dari, 3) Manusia akan mengikuti perubahan yang terjadi ketika tidak memiliki daya tawar dan kemampuan untuk mengoreksi, 4) Unsur kekuasaan yang digunakan: Kekuasaan Politik, Kekuasaan Ekonomi, Kekuasaan Moral (Rudi Saprudin Darwis, 2012).



Gambar 4. Sistem Agribisnis dengan Penguatan pada Subsistem Agribisnis Hilir

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA BERBASIS TEKNOPRENEUR DAN KOMPONEN PENDUKUNG

Dalam upaya meningkatkan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran di bidang pertanian dibutuhkan sumberdaya yang berwawasan bisnis (pengusaha) dengan teknologi, sehingga mampu merubah kultur bertani menjadi kultur bertani yang berkelanjutan. Data jumlah *entrepreneur* di Indonesia baru mencapai 0,18%, sedangkan di Singapura 7% dan di Amerika 11%. Padahal bangsa Indonesia perlu menciptakan minimal 2% atau 4,6 juta wirausaha. Disisi lain, jumlah pengangguran terdidik yang merupakan output dari perguruan tinggi (PT) setiap tahun sekitar 20%. Lulusan PT lebih berperan sebagai pencari kerja (*job seeker*) daripada menjadi pencipta kerja (*job creator*). Hal ini dikarenakan perguruan tinggi masih lebih terfokus pada bagaimana menyiapkan para mahasiswa yang cepat lulus dan mendapat pekerjaan (Hendarman, 2010).

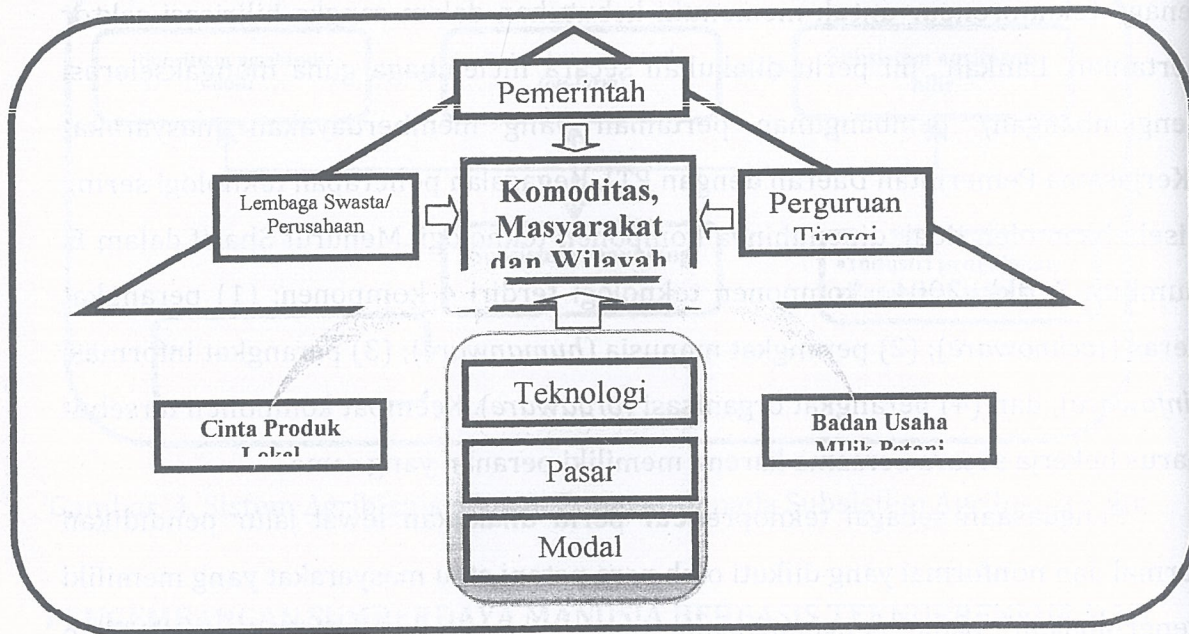
Data lain menyebutkan *entrepreneur* di Malaysia berjumlah 3%, Cina mencapai 10%, sehingga perlu meningkatkan kapasitas SDM untuk menguasai *entrepreneur*. Di Indonesia terjadi peningkatan jumlah pengangguran intelektual lulusan PT, pada bulan September 2011 mencapai 1.132.751 orang atau naik 15,71% dibandingkan tahun 2010, sehingga perlu adanya perubahan orientasi dari pencari kerja menjadi pembuat kerja.

Dalam jangka lebih pendek perlu adanya upaya transformasi/ diciptakan tenaga teknopreneur untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka hilirisasi sektor pertanian. Langkah ini perlu dilakukan secara melembaga guna mengakselerasi pengembangan/ pembangunan pertanian yang memberdayakan masyarakat (Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT). Kegagalan penerapan teknologi sering disebabkan oleh tidak dipenuhinya komponen teknologi. Menurut Sharif dalam E. Gumbira S, dkk, 2004, komponen teknologi terdiri 4 komponen: (1) perangkat keras (*technoware*); (2) perangkat manusia (*humanware*); (3) perangkat informasi (*infoware*); dan (4) perangkat organisasi (*orgaware*). Keempat komponen tersebut harus bekerja secara bersama karena memiliki peranan yang sama.

Penguasaan sebagai teknopreneur perlu dilakukan lewat jalur pendidikan formal dan nonformal yang diikuti oleh para petani atau masyarakat yang memiliki keperpihakan pada pengembangan industri pertanian. Tujuan pendidikan teknopreneur adalah menyediakan tenaga dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan bagi pemberdayaan masyarakat. Keberadaan teknopreneur tentunya akan memudahkan proses adopsi inovasi teknologi sehingga masyarakat akan berdaya mengelola usahatannya dan usaha pengolahan hasil produksinya. Pada saat ini banyak industri yang berbasis agribisnis, tetapi industri tersebut dimiliki secara individu, sehingga nilai tambah tidak dimiliki oleh masyarakat penghasil komoditas. Upaya transformasi/ diciptakan tenaga teknopreneur harus dilakukan secara kelembagaan, sehingga 4 komponen teknologi dapat dilaksanakan secara optimal. Pelibatan kelembagaan dapat menggunakan kelembagaan yang sudah ada (misalnya kelompok tani-gabungan kelompok tani atau asosiasi yang ada).

Untuk memperkuat posisi dalam pemberdayaan masyarakat petani sudah saatnya dibentuk badan usaha milik petani (BUMP), dimana BUMP berperan sebagai upaya untuk mencapai keinginan atau cita-cita bahwa petani tingkat kehidupannya menjadi lebih makmur bukanlah hal yang baru. Penyebabnya

rendahnya daya saing petani adalah teknologi, modal, manajemen, organisasi dan pasar sering tidak berpihak terhadap kepentingan petani (Agus Pakpahan, 2012). Selanjutnya kemudahan dalam produksi dan pengolahan harus didukung kebijakan penanganan pasar dan pemasaran, sehingga dapat terjadi keseimbangan tingkat produksi dan konsumsi. BUMP juga dapat merupakan alternatif kelanjutan dari asosiasi/ gabungan kelompok tani yang sudah ada.



Gambar Model Pengembangan Kelembagaan Teknopreneur dan Faktor Pendukungnya

Pada masa lalu pertanian kita cenderung berorientasi produksi, sehingga pemasaran kurang bersahabat dan banyak merugikan pertanian (petani/ penghasil produk). Saat ini dibutuhkan model pasar baru atau penyesuaian pasar yang lebih bersahabat dengan produk pertanian (pasar tani). Pada intinya bagaimana peran tengkulak atau pedagang juga mementingkan keuntungan yang adil dengan produsen atau membentuk pasar untuk memudahkan produsen menikmati margin yang lebih tinggi

Kegiatan pemberdayaan merupakan upaya yang diarahkan pada akar persoalan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat, bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan

dan mendinamisasikan potensinya dan memberdayakannya. Pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya (Alfitri, 2011). Kapasitas dapat dilakukan jika tumbuh jiwa teknopreneur di masyarakat untuk penanganan pengolahan hasil dan kebijakan penanganan pemasaran hasil pengolahan (industri pertanian di perdesaan).

Keluasaan setiap individu dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kapasitas partisipasinya memberikan indikasi perluasan ruang publik untuk membangun dirinya, kelompoknya, dan sekaligus wilayah tempat mereka berada. Dalam pengertian luas, bahwa keleluasaan tersebut akan memberikan kesempatan yang luas pula bagi potensi wilayah untuk berkembang, menghasilkan produk terutama pangan lokal untuk dikonsumsi secara lokal maupun di ekspor ke wilayah lain. Keterlibatan publik yang lebih banyak dalam pengambilan keputusan, terutama kebijakan yang menyangkut eksistensinya merupakan paradigma baru yang harus didorong implementasinya (Budi Widayanto, 2010)

Pengembangan kelembagaan teknopreneur harus dilakukan secara tepat terutama hak dan kewajiban serta tanggungjawab/ kewenangan masing-masing bagian berdasarkan struktur tugas yang ada. Misalnya petani sudah melakukan tugas produksi, maka petani diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produksinya, sedangkan pihak lainnya (pemerintah daerah, swasta, PT) diarahkan bertanggung jawab dalam sarana dan prasarana teknologi pengolahan hasil produksi dan pendampingan pasar produknya. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT dapat dilakukan untuk mendidik tenaga teknopreneur dan menghasilkan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat dan wilayahnya.

Selain itu promosi cinta produk lokal perlu dilakukan untuk meningkatkan pasar hasil produksinya, selama ini sudah dilakukan tetapi sifatnya temporer dan belum ada keseimbangan antara pola produksi dengan pola konsumsi yang ada. Keseimbangan pola produksi dan konsumsi akan memudahkan perencanaan pada berbagai subsistem agribisnis yang terkait.

PENUTUP

Dengan melihat keterbatasan pada masyarakat dan wilayah pertanian di DIY dan tetap mempertahankan eksistensi sektor pertanian, maka upaya yang perlu dilakukan adalah pemihakan secara penuh pada masyarakat tani dan sektor pertanian dengan memperhatikan kebijakan produksi komoditi pada wilayah hilir dengan meningkatkan peran teknopreneur untuk menghasilkan produk. Kedua mendekatkan teknologi pengolahan secara penuh di tingkat masyarakat dan wilayah pertanian dan ketiga melakukan kebijakan dalam pengendalian pasar produk pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pakpahan, 2012. *Badan Usaha Milik Petani: Sebagai Sarana Gotong Royong Usaha Untuk Kemajuan Petani*. <http://xa.yimg.com/kq/groups>. [1 Juni 2012]
- Alfitri. 2011. *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Ahmad Erani Yustika. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY. Bahan-bahan Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2012.
- Budi Widayanto, 2010. *Prosiding Seminar Nasional Ketahanan Pangan dan Energi*. Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Bustanul Arifin, 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Cornelis Rintuh, Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. BPFE. Yogyakarta
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. <http://disperindag.kalbarprov.go.id>. [20 Mei 2013]
- E. Gumbira Sa'id, Rachmayanti, M. Zahrul Muttaqin. 2004. *Manajemen Teknologi Agribisnis: Kunci Menuju Daya Saing Global Produk Agribisnis*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Hendarman, 2010. *Kebijakan dan Program Kevirausahaan di Perguruan Tinggi. Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.*

Michael P. Todaro. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid 1.* Penerbit Erlangga. Jakarta.

Nazaruddin. 2008. *Manajemen Teknologi.* Graha Ilmu. Yogyakarta.

Oliver E. Williamson. 1987. *The Economics Institutions of Capitalism.* The Free Press A Division of Macmillan, Inc New York & Collier Macmillan Publishers London.

Rudi Saprudin Darwis, 2012. *Strategi Dan Teknik Dalam Pengembangan Masyarakat.* <http://blogs.unpad.ac.id/rsdarwis>. [6 Juni 2012)